



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH

Muhamad Bintang¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Judul penelitian ini adalah "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi" fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Cimahi tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Charles O Jones, yang mencakup dimensi organisasi, interpretasi dan penerapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dari dimensi organisasi, pendamping sudah paham memahami tugasnya masing masing, pendamping sudah memperoleh haknya, fasilitas berupa sekretariat PKH. Interpretasi, Dinas Sosial secara rutin mengadakan pelatihan dan rapat koordinasi. Penerapan, pendamping selalu mengadakan pertemuan antar KPM (P2K2). Hambatan, ketidaktepatan sasaran, rendahnya kesadaran KPM. Upaya, pemutakhiran data secara rutin, pemberian sanksi, serta peningkatan intensitas komunikasi. Selain itu, pengawasan melalui aplikasi SIKS-NG.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PKH, Kesejahteraan Sosial

Abstract

The title of this research is "Implementation of the Family Hope Program Policy in Realizing Community Welfare in Cimahi Tengah District, Cimahi City" the main focus of this research is to analyze how the implementation of the family hope program policy, as well as to find out the inhibiting factors and efforts. This research is motivated by poverty that occurs in Cimahi Tengah District. This research uses a descriptive qualitative approach method. Data collection techniques, interviews, observation and documentation. The theory of policy implementation used in this

research refers to the Charles O Jones model, which includes organizational dimensions, interpretation and application. The results of the study show that the implementation of the Family Hope Program Policy in Cimahi Tengah District The results of the study show that the implementation of the Family Hope Program Policy in Cimahi Tengah District The results of the study show that the Implementation of the Family Hope Program Policy from the organizational dimension, the facilitator has understood their respective duties, the facilitator has obtained his rights, facilities in the form of a PKH secretariat. Interpretation, the Social Service regularly holds training and coordination meetings. Implementation, facilitators always hold meetings between KPM (P2K2). Obstacles, inaccurate targeting, and low awareness among beneficiary families (KPM) are addressed. Efforts include regular data updates, sanctions, and increased communication intensity. Furthermore, monitoring is carried out through the SIKS-NG application.

Keywords: Policy Implementation, PKH, Social Welfare

PENDAHULUAN

Berdasarkan definisi dari BPS dan Kementerian Sosial, kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang tidak sanggup memenuhi keperluan dasar minimum guna menjalani kehidupan yang layak, termasuk kebutuhan pangan dan non-pangan. Kebutuhan non-pangan mencakup aspek-aspek seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam menentukan tingkat kemiskinan, BPS menerapkan metode *basic needs approach* (kebutuhan dasar), yang menilai kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi individu guna memenuhi kebutuhan utama, dilihat dari tingkat pengeluarannya

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah mulai menyelenggarakan PKH (Program Keluarga Harapan) di tahun 2007. Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang berumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. PKH memberikan akses pelayanan kesehatan serta pendidikan kepada keluarga miskin, khususnya yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, atau anak-anak. Seiring perkembangan, penerima manfaat juga meliputi penyandang disabilitas dan lansia, dengan tetap memperhatikan ketentuan besaran bantuan sebagaimana tertuang pada UUD.

Tujuan pokok dari pelaksanaan PKH yaitu menekan angka kemiskinan, mencegah berlanjutnya kemiskinan, mengoptimalkan mutu sumber daya manusia, dan mengubah pola tingkah laku negatif yang menghambat tercapainya kesejahteraan pada kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah.

Program Keluarga Harapan di Kota Cimahi khususnya di Kecamatan Cimahi tengah baru berlangsung pada bulan Agustus tahun 2013, setiap per triwulannya Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi tengah menyalurkan bantuan kepada seluruh keluarga yang terdaftar menjadi Keluarga Penerima Manfaat PKH. berikut adalah data penerima PKH Kecamatan Cimahi tengah.

Tabel 1.1
Data Rekap Verifikasi dan Validasi Data Penerima PKH Tahun 2024
Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

No	Kelurahan	Data Penerima PKH Tahun Di Verival
1	Cimahi	168
2	Padasuka	832
3	Cigugur Tengah	658
4	Setiamanah	320
5	Karangmekar	126
6	Baros	185
Jumlah		2289

Sumber: Data Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2024

Distribusi data tersebut tersebar di enam kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah. Kelurahan Padasuka menempati urutan tertinggi dengan jumlah 832 data penerima bantuan PKH diverival, disusun oleh Kelurahan Cigugur Tengah sebanyak 658 data. Selanjutnya, Kelurahan Setiamanah mencatat 320 data, Kelurahan Baros sebanyak 185, dan Kelurahan Karangmekar sebanyak 126 data. Sementara itu, Kelurahan Cimahi mencatat jumlah terendah dengan 168 data yang telah diverifikasi dan divalidasi, dari data yang telah tercatat, jumlah penerima bantuan PKH yang telah diverifikasi nantinya akan menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan.

Data ini menunjukkan adanya ketimpangan jumlah penerima bantuan PKH antar kelurahan di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah yang terdapat di Kelurahan Padasuka dan Cigugur Tengah. Artinya, dengan melihat data tersebut, dapat dipahami bahwa angka kemiskinan yang tinggi ada di Kelurahan Padasuka dan Cigugur Tengah yang mencerminkan adanya permasalahan sosial yang signifikan di wilayah tersebut.

Tabel 1.2
Data KPM PKH Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah KPM PKH
1	2021	2042
2	2022	2866
3	2023	2390
4	2024	2317

Sumber: BPS Kota Cimahi Tahun 2024

Berdasarkan data penerima Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi selama periode empat tahun terakhir, terlihat adanya perubahan dalam jumlah keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2021, jumlah KPM tercatat sebanyak 2.042 keluarga. Angka ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, dengan total 2.866 KPM, namun demikian pada tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah KPM. Pada 2023, jumlah penerima turun menjadi 2.390 KPM, dan terus menurun pada tahun 2024 menjadi 2.317 KPM.

Program Keluarga Harapan ini diperuntukan untuk masyarakat miskin dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Namun pada kenyataan dilapangan Program Keluarga Harapan ini masih belum optimal. Permasalahan yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini diantaranya yaitu, dimana data penerima bantuan PKH belum tepat sasaran, dapat diidentifikasi juga kinerja dari para pelaksana program keluarga harapan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi masih belum optimal dalam pelaksanaan program ini yang mengakibatkan tidak tepat sasaran dalam menentukan KPM Program Keluarga Harapan dan belum optimalnya pemutakhiran dan validasi data dapat dilihat perbedaan data tersebut mengindikasikan bahwa proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Akibatnya, masih terdapat kemungkinan inclusion error (penerima yang tidak seharusnya menerima) maupun

exclusion error (keluarga yang seharusnya menerima tetapi tidak terdata).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dari Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, KASI PFM Jaminan Sosial Kota Cimahi, Camat Cimahi Tengah, Koordinator PKH Kota Cimahi, Koordinator Program Keluarga Harapan Kecamatan Cimahi Tengah, Pendamping PKH Kecamatan Cimahi Tengah, Keluarga Penerima Manfaat PKH. Data juga dikumpulkan melalui observasi langsung serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan dokumen resmi yang berkaitan. Model analisis yang digunakan adalah model implementasi Charles O Jones yang terdiri dari 3 dimensi utama yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH

Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisis dengan menggunakan teori Charles O Jones yang mencakup 3 dimensi penting yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan.

a) Penerapan

Dimensi organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan yang berfokus pada pembentukan dan penataan sumber daya serta metode kerja agar kebijakan dapat dioperasionalkan secara efektif. Dalam dimensi organisasi peneliti menemukan beberapa indikator yang terkandung di dalamnya yaitu diantaranya sumber daya dan metode Kerja.

Sumber daya Salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan adalah ketersediaan sumber daya yang memadai,

baik dalam bentuk sumber daya manusia, sumber daya fasilitas maupun sumber daya finansial. Dari hasil penelitian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi di setiap kelurahan terdapat 1 sampai 2 pendamping PKH, dari indikator sumber daya finansial para pendamping sudah mendapatkan gaji yang dikatakan sudah cukup dan sesuai sebagai pelaksana PKH ini dan dari indikator sumber daya fasilitas para pendamping mempunyai sekretariat atau kantor untuk memudahkan mereka bekerja.

Metode Kerja, Metode kerja dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai cara, mekanisme, atau prosedur yang digunakan oleh pelaksana program untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan metode kerja ini merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Indikator metode kerja ini setiap pendamping PKH umumnya bertanggung jawab atas satu kelurahan dengan jumlah KPM sekitar 300–350 keluarga, dan apabila jumlah tersebut melebihi kapasitas, pendampingan dilakukan secara bersama dengan maksimal dua pendamping per kelurahan. Metode kerja yang diterapkan meliputi *ground checking*, pembaruan data KPM, pemutakhiran desil, serta kunjungan rumah (*home visit*). Pola kerja yang fleksibel ini menunjukkan bahwa pendamping PKH menitikberatkan pada pelayanan langsung kepada masyarakat guna memastikan ketepatan sasaran dan keakuratan data penerima bantuan.

b) Interpretasi

Dimensi interpretasi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kemampuan pelaksana kebijakan dalam memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan isi kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi kebijakan ke dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan

sasaran kebijakan. Interpretasi berperan untuk memastikan bahwa makna, tujuan, serta ketentuan dalam kebijakan dapat dipahami dengan benar oleh para pelaksana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan interpretasi yang tepat, setiap ketentuan dalam kebijakan dapat dijalankan secara konsisten sesuai dengan maksud dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam dimensi interpretasi peneliti menemukan satu indikator yang terkandung di dalamnya yaitu substansi kebijakan.

Substansi Kebijakan, Substansi kebijakan memegang peranan penting sebagai landasan utama bagi para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu program agar tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Pemahaman yang komprehensif terhadap substansi kebijakan memungkinkan implementor untuk menafsirkan isi kebijakan secara tepat, sehingga setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan arah dan sasaran program. Dalam konteks Program Keluarga Harapan, substansi kebijakan tidak hanya memuat tujuan dan sasaran program, tetapi juga mengatur mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban penerima manfaat, serta peran para pelaksana di lapangan. Substansi kebijakan Program Keluarga Harapan menempatkan pendamping PKH sebagai aktor utama dalam menyampaikan tujuan program, ketentuan yang harus dipatuhi, serta berbagai pembaruan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat melalui beragam media dan kegiatan pendampingan. Peran pendamping tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa isi kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh KPM, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan.

Di sisi lain dukungan dari Dinas Sosial melalui pelatihan, pembekalan, serta penyediaan buku pedoman menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pendamping maupun KPM terhadap kebijakan PKH. Dukungan tersebut membantu pelaksanaan program agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan pedoman yang

berlaku. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap substansi kebijakan, KPM dapat menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan sebagai penerima bantuan, sehingga tujuan Program Keluarga Harapan dapat diwujudkan secara optimal.

c) Penerapan

Dimensi penerapan merupakan aspek yang menekankan pada aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin serta berbagai bentuk kegiatan lain yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Penerapan menjadi tahapan penting dalam implementasi kebijakan karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan secara konseptual benar-benar dijalankan dalam bentuk tindakan nyata oleh pelaksana di lapangan. Dengan kata lain, dimensi penerapan menunjukkan sejauh mana kebijakan diterjemahkan menjadi kegiatan operasional yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam dimensi ini peneliti menemukan satu indikator yaitu pelayanan rutin.

Pelayanan Rutin, Pelayanan atau kegiatan rutin merupakan bagian utama dari dimensi penerapan yang menggambarkan pelaksanaan kebijakan secara berkesinambungan melalui aktivitas nyata yang dilakukan oleh pelaksana di lapangan. Kegiatan rutin dalam konteks kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan terjadwal untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan rutin dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari terselenggaranya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan. Kegiatan P2K2 berfungsi sebagai sarana pembinaan dan edukasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana pendamping menyampaikan berbagai materi yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian keluarga. Melalui kegiatan ini, KPM diharapkan mampu mengelola kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih baik,

sehingga tujuan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat tercapai.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan peneliti menemukan bahwa ada beberapa KPM yang tidak hadir dalam kegiatan P2K2 tersebut dan ada salah satu KPM yang digantikan kehadirannya oleh orang lain. Peneliti menganalisis bahwa, pelayanan rutin yaitu Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam pelaksanaannya sudah bisa dikatakan cukup baik akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini masih dikatakan belum baik dimana peneliti menemukan kurangnya partisipasi KPM dalam menjalankan kewajibannya yaitu mengikuti pelaksanaan P2K2.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH

Implementasi kebijakan program keluarga harapan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi mengalami berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu hambatan utamanya yaitu hambatan pertama yang paling sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, masih ditemukan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar sebagai penerima bantuan, namun secara kondisi sosial ekonomi sebenarnya tidak berhak mendapatkan program bantuan itu. Hal ini terjadi karena proses verifikasi dan validasi data belum berjalan optimal.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari para KPM dalam menjalankan kewajibannya sebagai penerima PKH, seperti menghadiri Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Rendahnya tingkat kehadiran KPM dalam kegiatan tersebut sering kali disebabkan oleh faktor kesibukan, kurangnya pemahaman

terhadap manfaat program, serta masih lemahnya motivasi untuk berpartisipasi aktif.

UPAYA UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH

Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui peningkatan kedisiplinan dan partisipasi KPM, terutama dalam kegiatan P2K2. Pendamping menerapkan mekanisme teguran bertahap, mulai dari peringatan lisan hingga tertulis, sebagai sanksi edukatif untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab KPM terhadap kewajibannya. Pendekatan ini dilakukan secara tegas namun tetap humanis agar KPM memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam program.

Selain itu, pendamping memperkuat komunikasi dengan KPM melalui pertemuan rutin dan kunjungan rumah guna mengidentifikasi permasalahan di lapangan serta membangun kepercayaan. Dari sisi kelembagaan, Dinas Sosial Kota Cimahi melalui Seksi LINJAMSOS mendukung pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PKH dengan memanfaatkan sistem SIKS-NG. Sistem ini memudahkan monitoring data KPM secara berjenjang dan transparan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan finansial mampu menunjang kinerja pendamping dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap KPM. Metode kerja pendamping juga berjalan terstruktur melalui pembagian wilayah, validasi data, serta kerja sama lintas lembaga. Substansi kebijakan PKH sebagai bantuan sosial bersyarat dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik melalui peran pendamping dan dukungan Dinas Sosial. Selain itu, pelayanan rutin melalui kegiatan P2K2

masih mengalami hambatan yaitu kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan P2K2.

Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cimahi Tengah masih menghadapi beberapa hambatan di antaranya adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat (KPM) dan rendahnya kesadaran KPM dalam menjalankan kewajiban mengikuti kegiatan P2K2. Hambatan-hambatan tersebut perlu mendapatkan perhatian agar tidak menghambat pencapaian tujuan utama program, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya Mengatasi hambatan-hambatan yaitu adalah pemutakhiran data secara rutin dan berkelanjutan guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan, pemberian teguran dan sanksi terhadap KPM yang tidak memenuhi kewajibannya, serta peningkatan intensitas komunikasi dan pendampingan melalui pertemuan langsung maupun kegiatan P2K2. Selain itu, pengawasan terhadap KPM juga dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG untuk memantau data, pelaporan, serta kepatuhan peserta terhadap aturan program.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nugroho, R. (2017). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. (2021). KEMENTERIAN SOSIAL RI.

Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Strategi, dan Penerapannya dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Gerdian Hadi Surya, Denny Hernawan, E. S. (2024). (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. *Jurnal KarimahTauhid*, 3(6), 91-99.

Indra Kristian. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23-24.

Nisra, Uceng, A., Sapri, & L, S. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 90–95.

BPS. (2011). *Penjelasan Data Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>